

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim merupakan isu global yang bersifat lintas batas (*borderless issue*) dan menjadi ancaman nyata bagi stabilitas lingkungan, ekonomi, dan keamanan manusia (Windessy et al., 2025). Saat ini, di berbagai daerah di dunia terjadi sebuah fenomena nyata yakni meningkatnya cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan degradasi lingkungan (Gulo, 2024). Kondisi tersebut mendorong negara-negara dunia internasional untuk membangun kesepakatan secara kolektif melalui kerjasama keamanan internasional.

Pergeseran kajian keamanan internasional telah terjadi dimulai semenjak berakhirnya perang dingin yang mana ditandai dengan munculnya permasalahan politik, ekonomi, insani/individu dan ekologi (Kuswardini & Suprpto, 2019). Isu perubahan iklim dunia menjadi pembahasan yang sangat hangat akhir-akhir ini karena dampak negatif yang ditimbulkan dan akan ditanggung oleh generasi selanjutnya. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim global bagi generasi selanjutnya adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, seperti banjir, kekeringan, dan badai, mengancam ketahanan pangan dan infrastruktur yang ada (Kumar et al., 2021). Selain dampaknya juga terjadi pencairan es di kutub yang menyebabkan naiknya permukaan laut, yang dapat mengakibatkan hilangnya wilayah pesisir dan memaksa migrasi massal penduduk (Khan, 2019).

Respon negara-negara dunia internasional kemudian memunculkan kesepakatan melalui Perjanjian Paris pada tahun 2015 dan muncul *Conference of the Parties* atau yang kemudian penulis singkat menjadi "COP". COP merupakan wadah negosiasi multilateral yang mempertemukan negara-negara anggota United Nations Framework Convention On Climate Change

(UNFCCC) untuk merumuskan, meninjau, serta memperkuat kebijakan dan komitmen kolektif dalam menghadapi perubahan iklim global, termasuk melalui mekanisme *Nationally Determined Contributions* (Aisya, 2019).

NDCs merupakan kesepakatan atas dasar komitmen sukarela masing-masing negara pihak dalam Perjanjian Paris untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oleh karena itu, negara-negara tidak hanya menetapkan sasaran pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga merumuskan strategi kebijakan, kerangka implementasi, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi yang akan digunakan untuk memastikan ketercapaian komitmen tersebut dalam kerangka rezim perubahan iklim internasional.

Nationally Determined Contribution (NDC) India pasca COP26 merupakan manifestasi konkret dari kebijakan luar negeri India dalam rezim perubahan iklim. Hasil COP ke 26 India, menjadi pembahasan yang sangat hangat karena pada COP26 India ditekan untuk sampai pada *net zero emission* pada tahun 2030. Hal tersebut terjadi bukan tanpa sebab meningkatnya urgensi global dalam menekan laju perubahan iklim serta posisi India sebagai salah satu negara dengan tingkat emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Namun, karena ada kepentingan nasional India, kemudian India melakukan pembentukan *Nationally Determined Contributions* (NDCs) atas *output* dari COP26 tersebut, *output* tersebut adalah kebijakan yang mencakup komitmen untuk mengurangi emisi dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan, India mengambil sikap untuk sampai pada *net zero emission* pada tahun 2070 sehingga India mengusahakan menggunakan energi terbarukan sebesar 50% di tahun 2030 (Change, 2022).

Alasan India sampai pada energi terbarukan sebesar 50% pada tahun 2030 diperkuat dalam riset yang ditulis oleh Singh et al., (2024) dijelaskan bahwa India memiliki potensi energi yang besar sekitar 900 gigawatt (GW) dari sumber yang layak secara komersial, termasuk tenaga angin (100 GW pada ketinggian minimum 80 meter), pembangkit listrik tenaga air kecil (20 GW), bioenergi (25 GW), dan tenaga surya listrik (750 GW). Namun, hal tersebut tampak belum maksimal karena masalah iklim yang ada di India.

Idealnya dengan adanya *Nationally Determined Contributions* (NDCs) masalah iklim di India akan surut bahkan menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Namun, tidak demikian, masalah iklim India masih menjadi masalah yang sangat urgent untuk ditemukan jalan keluarnya hingga tahun 2025 ini. India memiliki populasi yang sangat padat, mencapai 1.433.840.754 jiwa (Worldometer, 2023), dan menyumbang 75% polusi udara dunia (BBC, 2023). Kontribusi ini disebabkan oleh ketergantungan pada energi yang belum sepenuhnya terbarukan, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mengatasinya (Ismira et al., 2023). Indeks kualitas udara (AQI) menunjukkan bahwa kualitas udara di New Delhi mencapai 611, jauh di atas ambang batas aman, menjadikannya salah satu kota dengan kualitas udara paling berbahaya di dunia (Sawindaningrum, 2023).

Kepentingan nasional India dalam isu perubahan iklim tercermin dalam kebijakan luar negerinya yang bersifat pragmatis dan defensif terhadap tekanan negara maju. India berupaya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab global dan kebutuhan pembangunan domestik. Kebijakan luar negeri India dalam COP26 tidak dapat dilepaskan dari orientasi pembangunan, ketahanan energi, dan kedaulatan kebijakan nasional.

Implementasi *Nationally Determined Contributions* (NDCs) India kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan nasional, khususnya di sektor energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengurangan intensitas emisi. Implementasi ini melibatkan koordinasi antarlembaga, penguatan regulasi, serta mobilisasi sumber daya domestik dan internasional. Tahap ini menjadi arena penting untuk menilai konsistensi antara komitmen internasional dan praktik kebijakan domestik.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh India perlu diuraikan dan ditunjukkan secara lebih konkret melalui tulisan ilmiah hal tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan bagaimana pemerintahan India mengimplementasikan *Nationally Determined Contributions* (NDCs) tersebut dari hasil COP26 hingga saat ini, penjelasan ini akan memuat sebuah kejelasan sekaligus tantangan-tantangan India dalam melaksanakan atau megimplementasikan

Nationally Determined Contributions (NDCs) atas Conference of the Parties (COP26) tersebut.

Penelitian yang memiliki kesamaan terkait analisis dengan *Nationally Determined Contributions* (NDCs) India juga pernah dilaksanakan oleh Vaibhav et al., (2021) yang berfokus pada analisis komitmen dan strategi India dalam mencapai target *Nationally Determined Contributions* (NDCs) di bawah *Paris Agreement*, dengan penekanan pada transisi energi dan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca. Studi ini menelaah bagaimana India sebagai negara berkembang dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, ketahanan energi, dan komitmen iklim global.

Penelitian yang dilaksanakan memiliki urgensi yakni memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pertimbangan India sebagai negara berkembang dengan posisi strategis dalam rezim perubahan iklim internasional merespons tekanan global melalui kebijakan luar negeri dan ratifikasi *Nationally Determined Contributions* (NDCs) hasil negosiasi COP26. Urgensi penelitian ini juga terletak pada upaya mengisi kekosongan kajian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara komitmen internasional, kepentingan nasional, serta kebijakan iklim India dalam kerangka Hubungan Internasional.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini akan mengkaji mengenai “Mengapa India membentuk *Nationally Determined Contribution* (NDCs) sebagai pengganti *net zero emission* tahun 2030 pada COP26?”

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan tidak melebar ke aspek di luar tujuan penelitian, maka batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada implementasi *Nationally Determined Contributions* (NDCs) India pasca COP26, dengan rentang waktu sejak pengumuman komitmen India pada COP26 tahun 2021 hingga periode penelitian dilakukan (2025).
2. Penelitian ini hanya mengkaji kebijakan dan langkah strategis pemerintah resmi India dalam merespons dan mengimplementasikan NDCs, sehingga tidak membahas secara mendalam peran aktor non-negara seperti LSM, sektor swasta, atau masyarakat sipil secara terpisah.
3. Analisis difokuskan pada alasan India dalam kebijakan luar negerinya terkait dengan *Nationally Determined Contributions* (NDCs), terutama yang berkaitan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca, transisi energi, dan peningkatan penggunaan energi terbarukan, tanpa mengkaji secara teknis detail perhitungan emisi atau aspek sains iklim secara mendalam.
4. Penelitian ini tidak membahas secara khusus dampak perubahan iklim di seluruh wilayah India secara mikro atau sektoral, melainkan menempatkan permasalahan iklim sebagai konteks kebijakan nasional dan hubungan internasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini ingin bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan alasan serta pertimbangan rasional India dalam membentuk *Nationally Determined Contributions* (NDCs) sebagai kerangka utama komitmen iklim pada forum COP26, sebagai alternatif dari penetapan target *net zero emission* tahun 2030.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diproyeksikan akan memberikan dua jenis manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis, adapun penjelasan secara lebih mendalam adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilaksanakan akan memberikan pemahaman secara lebih komprehensif mengenai dinamika internasional terkait dengan problem isu iklim, mampu memberikan wawasan mengenai masalah perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan serta memberikan pemahaman secara mendalam mengenai bagaimana negara-negara berinteraksi dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim dunia, khususnya menambah wawasan mengenai sikap India terhadap isu iklim di negaranya sendiri.

2. Manfaat Praktis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam studi rezim internasional perubahan iklim. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana prinsip, norma, dan aturan dalam rezim perubahan iklim global—sebagaimana tercermin dalam Paris Agreement dan COP26—memengaruhi perilaku serta kebijakan negara berkembang seperti India dalam mengimplementasikan Nationally Determined Contributions (NDCs).

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, rancangan sistematika penulisan akan diuraikan ke dalam lima bab yang terdiri lagi dari sub babasan. Berikut adalah gambaran besar pada setiap babnya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pemaparan mengenai alasan mendasar yang melatarbelakangi penelitian, rumusan pertanyaan yang ingin dijawab, batasan masalah penelitian, tujuan utama yang hendak dicapai, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian, serta gambaran sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas seputar landasan konseptual atau teoritis, penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang teknik atau metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan memiliki beberapa subbab yakni hasil dan pembahasan. Pada subbab hasil peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran masalah iklim india dan COP dari masa ke masa, kemudian menjelaskan secara mendalam dan komprehensif mengenai apa isi dan poin utama Nationally Determined Contributions (NDCs) India. Sedangkan subbab pembahasan dilakukan dengan mengacu pada data dan teori yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab V adalah bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Kesimpulan yang ditarik akan menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang diajukan, sedangkan saran merupakan hasil penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya atau lembaga dan negara terkait.